

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan mengenai landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Besaran Produk Domestik Regional Bruto antar daerah berbeda-beda, ini dikarenakan potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki antar daerah bervariasi. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara dalam periode satu tahun. Terdapat dua cara yang digunakan dalam menghitung pendapatan per kapita, yaitu berdasarkan harga tetap dan berdasarkan harga yang sedang berlaku. Jika kita menghitung berdasarkan harga tetap maka hasilnya disebut dengan pendapatan per kapita riil. Sebaliknya apabila kita menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga yang sedang berlaku maka hasilnya disebut dengan pendapatan perkapita nominal.

Pendapatan per kapita nominal adalah pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Sedangkan pendapatan per kapita riil adalah pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan tingkat

kenaikan harga atau inflasi. GDP Per kapita dianggap penting karena semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan mengakses jasa keuangan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang terbatas sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang. PDRB Per Kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB Per Kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. (Ramadhon, 2021)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, pada umumnya satu tahun. Indikator ini sering digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Umumnya, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu wilayah, maka semakin besar pula kemungkinan wilayah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan masyarakat yang tinggi (Novianti et al., 2022).

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, (BPS, 2025a). Indikator ini memberikan gambaran rata-rata pendapatan atau nilai tambah yang

dihasilkan oleh setiap individu di daerah tersebut, sehingga sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita dapat dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam satu tahun, dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk melihat struktur ekonomi, pergeseran antar sektor, serta kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah pada tahun berjalan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dapat dipengaruhi oleh inflasi atau perubahan harga, sehingga mencerminkan nilai nominal dari aktivitas ekonomi di wilayah tersebut pada tahun yang bersangkutan.

2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) adalah nilai tambah bruto yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu (tahun dasar), bukan harga tahun berjalan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun, tanpa terpengaruh oleh inflasi atau perubahan harga. Dengan demikian, PDRB harga konstan sangat penting untuk menilai perkembangan ekonomi yang sebenarnya, karena hanya mencerminkan perubahan volume atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, bukan karena kenaikan harga.

Dalam konteks pembangunan daerah, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita sangat relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Semakin tinggi nilai Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita suatu daerah, umumnya dianggap semakin sejahtera pula masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Indikator ini juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antar daerah, serta menjadi dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) terdapat tiga pendekatan dalam menghitung PDRB Per Kapita, adalah:

1. Pendekatan produksi

Dalam pendekatan ini PDRB digambarkan dengan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut kurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor dalam jangka waktu tertentu.

2. Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang berkontribusi dalam proses produksi dalam periode tertentu. Pendekatan ini dimana pendapatan nasional diperoleh dari jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang berkontribusi terhadap kegiatan produksi. Maksud dari pendapatan nasional tersebut adalah penjumlahan dari berbagai unsur dan jenis pendapatan yaitu:

- a. Kompensasi untuk pekerja, berupa gaji dan upah ditambah faktor lain terhadap upah dan gaji.

- b. Keuntungan perusahaan, berbentuk kompensasi yang diberikan kepada pemilik usaha yang diperuntukkan membayar pajak keuntungan perusahaan, deviden yang dibagikan kepada pemilik saham, dan ditabung oleh perusahaan sebagai laba atau keuntungan yang tidak dibagikan.
 - c. Pendapatan perorangan kompensasi penggunaan tenaga kerja dan sumber sumber dari *self employed person*, *self employed professional*, dan sebagainya.
3. Pendekatan pengeluaran

Pada pendekatan ini dimana menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas *output* yang dihasilkan suatu perekonomian berdasarkan harga pasar yang berlaku, atau secara singkat dari penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponennya adalah:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari laba.
- b) Pengeluaran pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor netto.

Perhitungan PDRB Per Kapita menggunakan harga konstan (tetap), maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan rill dari kuantum produksi dan sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyanjian Atas Dasar Harga Konstan ini pertumbuhan ekonomi rill dapat dihitung.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Teori yang mengungkapkan tentang konsep pertumbuhan ekonomi, secara umum yaitu:

- a. Teori Adam Smith

Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Jumlah penduduk akan meningkat jika upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup (Prastiwi et al., 2025) .

Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sementara itu, permintaan akan tenaga kerja akan ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal dan laju pertumbuhan output).

Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, dimana dia menyatakan bahwa empat faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan, dan akhirnya jumlah utang (Prastiwi et al., 2025).

2.1.3 Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Pertumbuhan ekonomi neoklasik solow-swan berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai

pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Teori ini didasarkan kepada anggapan teori klasik dimana diasumsikan bahwa perekonomian akan tetap mengalami keadaan *full employment* dan peralatan modal akan tetap digunakan sepanjang waktu. Teori ini di dipengaruhi oleh ketersediaan faktor-faktor seperti akumulasi modal (K), tenaga kerja (L) dan hasil/output (Y). Sektor pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Amanda, 2024).

Teori Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi dan kemajuan teknologi (Solow, 1956). Jumlah tenaga kerja yang meningkat akan berpengaruh positif terhadap peningkatan output sehingga pendapatan per kapita suatu daerah juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila jumlah tenaga kerja menurun atau jumlah pengangguran di suatu daerah meningkat, maka akan menghambat produktivitas sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. (Nashif, 2024).

Menurut teori solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan porsi tabungan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan investasi dalam bentuk barang modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi juga dapat membuat pendapatan tenaga kerja per orang dan memberikan inovasi pada perusahaan yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi (Martadinata, 2022).

2.1.4 *Human Capital Theory* (Teori Modal Manua)

Human Capital Theory dikembangkan oleh Backer (1993) dalam (Novitaningrum, 2025) yang mengemukakan bahwa investasi dalam pelatihan dan untuk meningkatkan *human capital* adalah penting sebagai suatu investasi dari bentuk-bentuk modal lainnya. *Human Capital Theory* berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat di dorong melalui pendidikan dan pelatihan. Individu yang berinvestasi dalam pendidikan akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih tinggi, termasuk peluang kerja yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Teori ini menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB per kapita. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar kontribusi pekerja terhadap output ekonomi daerah.

Teori Modal Manusia (*The Human Capital Theory*) menyatakan proses pendidikan, nilai-nilai, dan keterampilan yang berguna pada manusia dapat meningkatkan kapasitas belajar dan produktivitasnya. Semua ini yang memungkinkan pendapatan masa datang mereka, dengan meningkatkan penghasilan seumur hidup mereka. Proses pendidikan dilihat sebagai model investasi yang dibedakan dari konsumsi yang menghasilkan kepuasan atau manfaat segera, tetapi tidak menciptakan pendapatan masa depan. Becker menganggap bahwa tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi akan memberikan insentif bagi individu untuk berpartisipasi dalam tenaga kerja, sehingga meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terampil dan produktif dalam suatu

perekonomian. Hal ini dapat membawa pada peningkatan inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Selain itu, Becker juga menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi. pandangan Becker tentang pertumbuhan ekonomi menekankan pentingnya investasi dalam modal manusia sebagai salah satu faktor kunci yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan, pelatihan, dan kesehatan, masyarakat dapat meningkatkan 2. potensi pertumbuhan dan kemakmuran jangka panjang. (Evi, 2024).

2.1.5 Rata-Rata Lama Sekolah

Menurut UU No. 20 tahun 2003 pendidikan adalah suatu proses yang ada untuk mengembangkan potensi anak-anak atau peserta didik dengan tujuan agar menjadi manusia yang taat kepada agama, berilmu, kreatif, inovatif, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab di setiap aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of School*. Menurut, Badan Pusat Statistik (2024) Rata-Rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-Rata Lama Sekolah dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Perhitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah

telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP.

Menurut Todaro dalam (Nugroho, 2012) untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Jenjang pendidikan menurut Pasal 14 Undang-Undang No.20 tahun 2003, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun tiga (3) jenjang pendidikan tersebut sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar bagaimana kehidupan baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat.
2. Pendidikan Menengah Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan

menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi.

Selain itu, angka RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka RLS dapat dihitung dengan menggunakan variabel partisipasi sekolah, tingkat atau kelas yang sedang atau pernah dijalani, dan ijazah terakhir yang dimiliki. Rumus yang digunakan adalah:

$$MYS = \frac{1}{n} + \sum_{i=1}^n \mu_i$$

Dimana :

MYS : Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

μ_i : Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

n : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (2022) tingginya Rata-Rata lama sekolah menunjukkan banyaknya jumlah tahun standar dalam menamatkan pendidikan seseorang. Tingginya angka RLS juga mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan dalam memperoleh pendidikan pada suatu negara. Artinya, angka RLS yang semakin meningkat menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, dimana tingginya tingkat pendidikan masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindaknya (Swastika, 2023).

2.1.6 Upah Minimum Provinsi

Dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) menyatakan dasar hukum sebagai berikut: "Setiap warga negara dari berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia". Dengan demikian, gaji yang harus diterima karyawan atau pekerja kita untuk layanan yang mereka jual harus berupa upah yang wajar.

Secara umum, upah adalah jumlah yang diterima pekerja/karyawan selama mereka bekerja atau dianggap pekerjaan. Menurut Pasal 1 No. 30 UU No. 13 Tahun 2003, pengertian gaji adalah: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah merupakan hak pekerja yang harus ditetapkan sehingga merupakan suatu bentuk perlindungan pekerja. Dengan demikian, menurut UU No. 13 Tahun 2003, kebijakan perlindungan pengupahan meliputi:

- 1) Upah minimum
- 2) Upah kerja lembur
- 3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- 5) Upah untuk menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- 6) Bentuk dan cara potongan upah
- 7) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- 8) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- 9) Upah untuk pembayaran pesangon
- 10) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Salah satu faktor produksi yang mempengaruhi produksi adalah karyawan. Tenaga kerja dapat membantu dalam proses produksi untuk memastikan bahwa menghasilkan output yang diinginkan perusahaan. Pengorbanan keberadaan pekerja untuk perusahaan pekerja berhak atas upah yang diberikan oleh perusahaan

kepada pekerja tersebut dalam bentuk upah. Sadono (Sadono Sukirno, 2005) membedakan dua konsep upah yaitu :

- 1) Upah nominal (upah) adalah jumlah yang diterima pekerja dari pemberi kerja sebagai kompensasi atas kerja mental dan fisik dari pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
- 2) Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Menurut Simanjuntak dalam (Qolbi, 2024), menyatakan bahwa upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas jasa-jasa tenaga kerja yang diberikannya kepada pihak lain, yang diberikan baik seluruhnya berupa uang maupun sebagian berupa uang dan sebagian berupa artefak. Dalam penelitian ini, upah minimum digunakan untuk mengetahui bagaimana gaji mempengaruhi tingkat penyerapan karyawan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan batas upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di suatu provinsi, yang penetapannya dilakukan oleh gubernur berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri tenaga kerja. UMP berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup di daerah masing-masing. Penetapan UMP mempertimbangkan beberapa faktor utama seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks kebutuhan hidup layak sehingga

besaran UMP dapat mencerminkan kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut (Resmana & Gunawan, 2025).

Menurut teori ekonomi ketenagakerjaan, upah minimum dapat berdampak pada daya beli masyarakat, yang kemudian mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Menurut Faizin (2021), menaikkan upah minimum memiliki dampak yang baik bagi IPM karena meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar. Hipotesis ini juga menyatakan kemungkinan meningkatnya pengangguran jika upah minimum terlalu tinggi, karena perusahaan akan kesulitan untuk mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Upah Minimum Provinsi merupakan instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang strategis dalam menjamin kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Penetapan Upah Minimum Provinsi yang efektif dan berkelanjutan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil dan inklusif.

Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Komponen KHL dihitung berdasarkan kebutuhan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan dasar layak fisik yang didalamnya meliputi kebutuhan akan pangan perhari, pakaian, perumahan, pendidikan, dan lain sebagainya untuk satu bulan. Upah minimum cenderung meningkat setiap tahun seiring meningkatnya upah nominal

kesejahteraan (riil). Sehingga, penetapan upah minimum bertujuan untuk menjamin penghasilan yang diterima oleh para tenaga kerja agar tidak lebih dari suatu tingkat tertentu (Bagus, 2023).

Latar belakang ditetapkannya upah minimum adalah sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan pekerja, dimana upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar tidak ada nilai upah yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Tidak hanya itu, upah minimum juga melindungi dan menjamin kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja produktif.

2.1.7 Penanaman Modal Dalam Negeri

Di Indonesia, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 yang berisikan bahwasanya “penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan untuk menjalankan suatu usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”. Pada hakekatnya investasi merupakan salah satu komponen yang dapat mendorong terjadinya pembangunan ekonomi baik dari peningkatan jumlah produksi maupun terbukanya peluang kesempatan kerja. Investasi dapat bersumber dari pemerintah, swasta maupun kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Adapun tujuan penanaman modal menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 3 ayat (2):

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Menciptakan lapangan pekerjaan;
 - c. Meningkatkan pembangunan, kemampuan daya saing usaha;
 - d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
 - e. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.⁶⁵
- PMDN dalam Undang-Undang no.6 Tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pasal 1 sebagai berikut:
1. Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara mapun swasta asing yang berdomisili di Indonesia guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal terakhir tidak diatur ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
 2. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Besarnya tingkat investasi memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi atau pproduk domestic regional bruto (PRDB). Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dapat digunakan pemerintah daerah untuk pengembangan modal yang nantinya dapat direalisasikan ke dalam berbagai proyek sebagai penunjang kegiatan pembangunan didalam suatu wilayah tertentu.

Menurut Mankiw dalam (Maharani, 2025), investasi dalam negeri mencakup semua pengeluaran untuk barang modal yang dapat digunakan untuk

memproduksi barang dan jasa di dalam negeri. Dalam konteks Penanaman Modal Dalam Negeri, investasi ini tidak hanya terbatas pada pembelian aset fisik, tetapi juga mencakup pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (R&D) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam produksi. Tujuan utama PMDN adalah untuk memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dan menyoroti pentingnya PMDN dalam dan meningkatkan daya saing industri lokal, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi ketergantungan pada investasi asing.

Selain itu, terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Alam salah satu faktor yang dapat mempengaruhi investasi dengan kondisi lingkungan sekitar seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan dan penurunan angka korupsi suatu daerah. Selain itu faktor penunjang untuk meningkatkan investasi dari dalam negeri disuatu negara adalah sektor pariwisata, perdagangan, industri pengolahan barang dan jasa. Potensi sumber daya alam memberikan pengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu selain dapat meningkatkan investasi, serta mengadakan pemasaran terkait investasi yang dilakukan. Sehingga dapat ikut menggerakkan nilai dari asset sekitar untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
- b. Biaya Investasi (Suku Bunga). Suku bunga bagian dari faktor penunjang investasi dari dalam negeri yang digunakan sebagai penentuan tingkat pengembalian modal atas resiko yang ditanggung oleh pemilik modal

(investor) dan digunakan dalam rangka memaksimalkan keuntungan.

Ketika suku bunga yang tinggi tentunya akan mengalami kerugian investasi yang dilakukan oleh investor, sedangkan ketika tingkat suku bunga rendah cendurung mendorong pengusaha melakukan investasi karena biaya pemakaian modal yang lebih murah

- c. Pendapatan Nasional. Pendapatan nasional menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita untuk melihat perkembangan perekonomian. Meningkatnya pendapatan nasional yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan terhadap pembentukan modal domestik bruto. Sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modalnya, dengan memperkirakan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Kemudian, berikut Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) antara lain, yaitu :

- a. Mengurangi ketergantungan negara terhadap produk asing
- b. Mampu menghemat devisa
- c. Mendorong kemajuan industri dalam negeri
- d. Memberikan kontribusi sebagai penyerapan tenaga kerja

Penanaman modal dalam negeri menjadi salah astu kunci utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Invetasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah. Penanaman dalam bentuk modal ini akan membawa menuju kearah kemajuan teknologi (Cahyaningrum, 2024).

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Setiap penelitian memerlukan dasar atau pijakan yang dapat dijadikan sebagai acuan maupun referensi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya guna dijadikan pembanding serta membantu peneliti dalam menemukan kebaruan (novelty) pada penelitian yang akan dilakukan.

Pada bagian ini, disajikan beberapa hasil studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang tengah dikaji. Referensi yang digunakan berasal dari jurnal nasional maupun internasional. Rangkuman penelitian-penelitian tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Yosef (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan terhadap PDRB Per Kapita di indonesia	Variabel RLS dan PDRB Per Kapita.	Variabel AHH DAN AMH.	Rata-Rata Sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Per Kapita.	<i>Journal of Law, Administra tion, and Social Science</i>
2	Iriani (2025) Analis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara 2010-2020.	Variabel RLS dan PDRB Per Kapita.	Variabel TPAK, TPT dan AHH.	Rata-Rata Sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB Per Kapita.	<i>journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)</i>
3	Winarni (2023). Analisis Pengaruh Upah Minimum,	Variabel UMP, PDRB Per Kapita.	Tenaga Kerja, Pertumbuh	UMP berpengaruh positif dan	<i>Ekonomis: Journal of Economics</i>

	Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PDRB per kapita Provinsi Jambi.	an Ekonomi.	signifikan terhadap PDRB per Kapita.	<i>and Business</i>
4	Frido (2024) Analisis Pengaruh PMDN dan PMA terhadap PDRB di Sumatera Utara (<i>Analysis of the Influence of PMDN and PMA on GRDP in North Sumatra</i>)	Variabel PMDN dan PDRB.	Variabel PMA.	PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP)
5	Erika (2022) Analisis Pengaruh PMDN dan PMA terhadap PDRB Per Kapita Jawa Timur.	Variabel PMDN dan PDRB Per Kapita.	Variabel PMA.	Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita. <i>Journal Of Economics</i>
6	Winarto (2022). Pengaruh Human Capital, Upah Minimum, dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Tengah	Variabel UMP, Human Capital dan PDRB Per Kapita.	Variabel Angkatan Kerja.	Upah Minimum Provinsi dan Human Capital berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. <i>Ekonomis: Journal of Economics and Business</i>
7	Rabbani (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum dan Jumlah UMKM terhadap	Variabel UMP dan PDRB.	Variabel TPAK IPM dan Jumlah UMKM.	Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)

	Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat tahun 2017-2021	Variabel RLS dan PDRB Per Kapita.	-	Rata-Rata Sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita.	Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi
8	Chindi (2025) Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap PDRB Per Kapita di Indonesia tahun 2022.	Variabel RLS dan PDRB Per Kapita.	-	Rata-Rata Sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita.	Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi
9	Rasnino (2022). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2014-2019	Variabel RLS dan PDRB.	Variabel KRT.	Rata-Rata Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.	Jurnal Impresi Indonesia (JII)
10	Huda (2021). Pengaruh Rata-Rata Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran per Kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018	Variabel RLS, PDRB dan lokasi penelitian.	Variabel AHH dan Pengeluaran per Kapita, tahun penelitian.	Rata-Rata Sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB.	Buletin Ekonomika Pembangunan
11	Shela (2025) Pengaruh Infrastruktur Publik terhadap PDRB Per Kapita tahun 2013-2022.	Variabel PMDN	Variabel PMA dan IPM.	Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita.	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)

12	Sadid (2024) nalysis Pengaruh Investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Belanja Modal, dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2018-2022	Variabel PMDN dan PDRB Per Kapita.	Variabel .PMA, Belanja Modal dan Tenaga Kerja.	Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita.	<i>Journal of Economics , Business, & Entrepre neurship</i>
13	Raiyatul (2022) Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Upah Minimum Provinsi dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi Aceh	Variabel UMP dan PDRB Per Kapita.	Variabel belanja pemerinta h, penyerapa n tenaga kerja dan lokasi penelitian	Upah minimum provinsi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita	Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi (JAIE)
14	Tjaja (2022) Pengaruh Tenaga Kerja, UMP dan PAD terhadap PDRB Perkapita di Wilayah Sumatera 2010- 2020	Variabel UMP dan PDRB Pe Kapita.	Lokasi dan tahun penelitian	Upah Minimum Provinsi mempunyai pengaruh positif terhadap PDRB per kapita	<i>The Journal Of Economic Development</i>
15	Rifky (2023) Kontribusi Variabel Makro Ekonomi (Studi Tentang Determinan Pertumbuhan Ekonomi di	Variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan PDRB Per Kapita.	Variabel TPAK dan AHH.	Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Indonesia 2010-
2020)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah dengan PDRB per Kapita

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah sendiri memiliki pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulya (2025) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rasnino (2022) menemukan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, maka modal manusia yang terjadi juga semakin meningkat. Modal manusia terjadi dengan melakukan investasi sumber daya manusia, yang dilakukan melalui berbagai jenis dan jenjang pendidikan, pengalaman yang diperoleh dari kerja, kesehatan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah suatu individu dapat berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara teoritis, hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah dan PDRB per kapita bersifat positif dan saling memperkuat. Peningkatan PDRB per kapita memperbesar potensi Rata-Rata Lama Sekolah, peningkatan satu tahun rata-rata lama sekolah memberikan dampak peningkatan terhadap PDRB per kapita.

2.2.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan PDRB per Kapita

Upah Minimum Provinsi merupakan standar minimum upah yang harus dibayarkan kepada pekerja di suatu provinsi. Secara teori, kenaikan Upah Minimum Provinsi akan meningkatkan pendapatan pekerja formal, sehingga daya beli dan konsumsi masyarakat juga meningkat. Peningkatan konsumsi ini akan mendorong permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan output ekonomi daerah dan tercermin dalam kenaikan PDRB Per Kapita (Tjaja & Yusnida, 2022). Penetapan Upah Minimum Provinsi yang memadai juga dapat memotivasi tenaga kerja untuk bekerja lebih produktif. Produktivitas yang lebih tinggi akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan di wilayah tersebut, sehingga berkontribusi pada kenaikan PDRB per kapita. Namun, jika kenaikan Upah Minimum Provinsi tidak diimbangi dengan produktivitas, bisa terjadi tekanan pada sektor usaha kecil dan informal.

Hasil penelitian Winarto & Retnowati (2022) menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita. Selain itu, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2023) menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi memiliki hubungan positif signifikan terhadap PDRB Per Kapita, karena pertumbuhan modal manusia didorong oleh upah minimum, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara Upah Minimum Provinsi dengan PDRB Per Kapita bersifat positif secara teoritis. Ketika Upah Minimum Provinsi naik, pekerja memiliki pendapatan lebih besar, konsumsi meningkat, permintaan barang/jasa naik, dan aktivitas ekonomi daerah bertumbuh. Hal ini mendorong kenaikan PDRB

Per Kapita. Sebaliknya, jika PDRB Per Kapita meningkat (misal karena pertumbuhan sektor industri atau jasa), pemerintah daerah memiliki ruang fiskal dan ekonomi yang lebih besar untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi yang lebih tinggi, sehingga memperkuat siklus pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

2.2.3 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan PDRB per Kapita

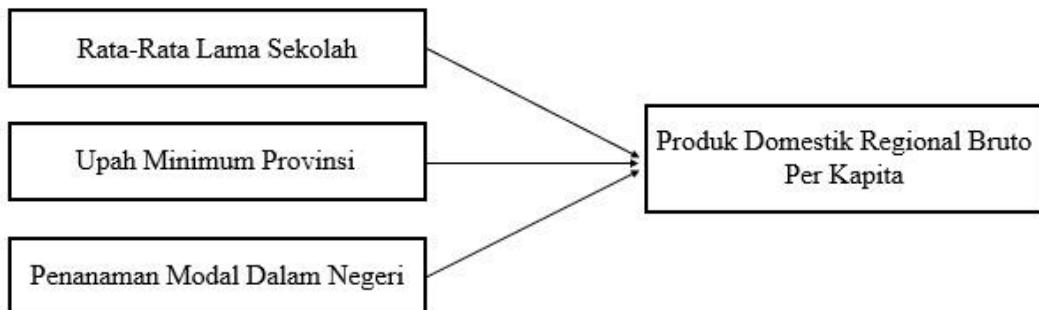
Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha domestik atau masyarakat dalam negeri dalam bentuk modal finansial atau aset produktif untuk memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manihuruk (2024) menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki hubungan positif dan Signifikan terhadap PDRB Per Kapita. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sadid & Wijimulawiani (2024) menemukan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri tentu akan memberikan dampak bagi suatu wilayah, karena selain sebagai penggerak perekonomian investasi Penanaman Modal Dalam Negeri juga menjadi faktor agar sumber daya yang ada disuatu daerah tidak dikuasai oleh orang asing.

Secara teoritis, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Setiap kenaikan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

akan diikuti dengan bertambahnya nilai PDRB Per Kapita, yang berarti investasi domestik menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi dan output di suatu wilayah.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bahwa Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Penanaman Modal Dalam Negeri mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. Oleh karena itu, dapat disusun kerangka pemikiran pada penelitian yang penulis lakukan dapat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengujian. Secara umum, hipotesis harus melibatkan minimal satu variabel independen dan satu variabel dependen. Peneliti merumuskan hipotesis berdasarkan hasil kajian teori yang telah dilakukan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Perkapita di Pulau Jawa tahun 2018-2023.
2. Diduga secara simultan Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Perkapita di Pulau Jawa tahun 2018-2023.